

ABSTRAK

Faqihuddin Rosyad : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS: PERIZINAN DI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN BEKASI).

Didalam Perda No 12 Tahun 2011 pasal 8 ayat 7 didalam poin b dan c ditegaskan bahwa: b). mempertahankan kawasan pertanian lahan basah dan/atau beririgasi teknis; c). mengendalikan alih fungsi lahan sawah menjadi kegiatan budi daya lainnya: akan tetapi dalam praktik dilapangan banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan seperti pembangunan perumahan di lahan basah yang tidak untuk peruntukan nya, seperti daerah sukatanani. Dalam rencana tata ruang wilayah disebutkan bahwa daerah tersebut tetap di pertahankan sebagai kawasan lahan basah. Akan tetapi dalam praktiknya justru lahan basah tersebut habis di bangun perumahan. Hal ini jelas menyalahi aturan pola ruang perda tersebut.

Rumusan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi? 2) Apa Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi? 3) Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No. 12 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi?

Adapun tujuan dari penelitian dalam hal ini adalah: 1) Untuk mengetahui sejauh mana prosedur perizinan Perda 12 Tahun 2011 tentang, rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Perda No. 12 Tahun 2011 tentang, rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi. 3) Untuk mengetahui Tinjauan siyasa dusturiyah terhadap upaya pemerintah dalam implementasi Perda No. 12 Tahun 2011 tentang, rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset kebijakan secara deskriptif dan explanatif. Desain penelitian ini menggunakan model Context, input, process, dan product (CIPP) sebagaimana yang diformulasikan oleh Stufflebeam melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi dan teknik pemeriksaan keabsahan data yang diharapkan bisa dilaksanakan secara konsisten.

Dari hasil penelitian ini menjabarkan Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 secara umum belum berjalan baik, dari mulai tahap sosialisasi, pengawasan, penitiban dan pemantauan. Faktor pendukung dan penghambat yaitu, masih kurang partisipasi dari masyarakat dan peraturan yang sudah disusun dengan baik menjadi faktor pendukung. Sedangkan ditinjau dari Siyasa Dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah ini pemerintah sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip Siyasa Dusturiyah tetapi masih banyak tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bekasi terkait rencana tata ruang wilayah belum ter Implementasi dengan baik.